

Kesenjangan Buruh Minyak di Balikpapan, 1950-1965

M. Jaris Almazani

Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada
muhammadjarisalmazani@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Kehadiran Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM)/Shell di Balikpapan sejak masa kolonial turut mengubah lanskap kota itu dan membentuk sebuah kelas sosial baru: buruh minyak. Walau terbagi dalam sekat-sekat etnis dan pangkat, sebagian besar buruh minyak Indonesia mempunyai persamaan nasib dan rutinitas. Meski kedaulatan Indonesia telah diakui pada 27 Desember 1949, hegemoni BPM/Shell di Balikpapan tetap bertahan hingga 22 Juni 1965 saat aset-asetnya diserahkan kepada PN Permina (Perusahaan Minyak Nasional). Kesenjangan antara buruh Indonesia dengan petinggi mereka yang berkebangsaan asing tetap bertahan yang berakibat pada konflik antara buruh Indonesia dengan atasan mereka. Ketidakpuasan mereka memuncak saat para buruh merebut kilang minyak di Balikpapan pada 16 September 1963 dan 23 Januari 1964. Artikel ini mengkaji kesenjangan yang terjadi di kalangan buruh Indonesia dan reaksi mereka terhadap hal tersebut menggunakan metode sejarah. Periode 1950-1965 dipilih karena pada masa itu terjadi pergolakan antara kedua belah pihak yang berujung pada nasionalisasi kilang minyak di Balikpapan. Secara keseluruhan, pada periode tersebut terjadi kesenjangan yang sengaja dipelihara oleh BPM/Shell. Kesenjangan tersebut bisa dilihat pada berbagai fasilitas yang disediakan, seperti perumahan, bioskop, dan kolam renang. BPM/Shell menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut untuk dua golongan terpisah, Eropa dan Indonesia. Selain itu, BPM/Shell juga melakukan pembedaan di kalangan buruh Indonesia sendiri melalui pembedaan gaji antara pegawai harian dan bulanan. Perlawanan kaum buruh sering kali dituangkan dalam bentuk protes, kecuali pada 1963 dan 1964 ketika mereka merebut kendali atas semua aset Shell dengan dukungan pemerintah daerah.

Abstract

The presence of the Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM)/Shell in Balikpapan, dating back to the colonial era, has changed the city's landscape and formed a new social class: oil workers. Despite their division based on ethnicities and ranks, most of the Indonesian oil workers shared a common fate and routine. Even though Indonesian sovereignty was recognized on 27 December 1949, BPM/Shell's hegemony over Balikpapan persisted until 22 June 1965, when their assets were ceded to PN Permina (Perusahaan Nasional Minyak). The inequality between Indonesian oil workers and their foreign superiors remained. Their discontent peaked on 16 September 1963 and 23 January 1964, when workers seized control of the Balikpapan refinery on both dates. This article examines the inequality among Indonesian oil workers and their reaction towards the inequality they suffered, using historical research methods. The period from 1950

Kata Kunci:

Balikpapan,
BPM, Shell,
kesenjangan,
nasionalisasi

Keywords:

Balikpapan,
BPM, Shell,
inequality,
nationalization

to 1965 was chosen because the various conflicts between the two groups reached a peak with the nationalization of the refinery in Balikpapan. As a whole, during that period, BPM/Shell deliberately maintained inequality among their workers. This can be seen in the various facilities that the company provides, such as housing, cinemas, and swimming pools. BPM/Shell provided these facilities for two separate groups, Europeans and Indonesians. The company also differentiated the wages of Indonesian oil workers based on their status, monthly or daily workers. Workers' resistance often manifested in the form of protests, except in 1963 and 1964 when they seized control of all Shell assets with the regional governments' support.

Pendahuluan

Eksplorasi minyak di Balikpapan dimulai pada 10 Februari 1897, saat pemboran minyak pertama kali dilakukan di sana. Sembilan bulan kemudian, pada 11 Oktober 1897, NIIHM (Nederlandsch-Indische Industrie en Handel Maatschappij, pendahulu BPM) membangun kilang minyak di Balikpapan dan mulai beroperasi pada akhir 1899 (Pratama, 2012: 85). Sejak saat itu, Balikpapan berubah dari sebuah desa nelayan kecil menjadi pusat industri minyak di timur Kalimantan. Dengan begitu, secara otomatis terbentuk kelas sosial baru di wilayah itu: kelas buruh atau proletar.

Sebagian besar buruh minyak berasal dari Jawa. Dari 2.000 buruh minyak yang bekerja di Balikpapan menjelang Perang Dunia II, sekitar 80 persen adalah orang Jawa. Banyak dari mereka yang sebelumnya bekerja di perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur (Magenda, 1991: 28-29). Akibatnya, terbentuk komunitas Jawa yang besar di Balikpapan. Pada 1930, dari jumlah 39.092 jiwa penduduk, sebanyak 10.222 jiwa beretnis Jawa (Magenda, 1991: 29).

Etnis Minahasa dan Banjar juga turut menyumbang jumlah tenaga kerja. Mayoritas mereka menjadi tenaga kerja terampil dan pegawai administrasi (kerani). Sebanyak 75 persen kerani adalah orang Minahasa, sedang sisanya diisi oleh orang Banjar. Proporsi ini tidak seimbang dengan jumlah penduduk dari kedua etnis tersebut. Per 1930, terdapat 7.389 orang Banjar dan hanya 668 orang Minahasa (Magenda, 1991: 28-29).

Selain ketiga etnis tadi, etnis Tionghoa juga berkecimpung di industri minyak walau dalam jumlah sedikit. Kendati demikian, sempat terjadi kerusuhan antara buruh Jawa dengan buruh Tionghoa pada awal April 1912 yang dipicu oleh cekcok mengenai tempat duduk di sebuah bioskop terbuka antara seorang Tionghoa dengan seorang bumiputera. Kerusuhan tersebut berakibat pada tewasnya dua orang Tionghoa, empat orang menderita luka berat, dan tiga orang Tionghoa (yang mencakup seorang buruh kontrak) mengalami luka ringan (*Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, 6 April 1912; *De Express*, 13 April 1912; Pratama, 2012: 112).

Mereka semua secara hierarkis berada di bawah pegawai Eropa, sesuai dengan segregasi rasial yang diterapkan pemerintah kolonial saat itu. Para pegawai Eropa menetap di kawasan pemukimannya sendiri, terpisah

dari para buruh bumiputra dan Tionghoa. Mereka juga mempunyai fasilitas olahraga dan rekreasi sendiri. Bahkan, para pekerja Indo-Eropa berada di bawah mereka yang totok dan dipersamakan dengan para pekerja Asia yang tertinggi (Pratama, 2012: 112-113).

Segregasi ini tampak dalam perkembangan pendidikan di Balikpapan. Golongan Eropa dan Indo-Eropa mendapat sekolah dasarnya (*Europeesche Lagere School*/ELS) pada 1916. Sejatinya, golongan bumiputra juga bisa bersekolah di sana, dengan syarat bahwa penghasilan orang tuanya minimal sebesar 100 gulden. Syarat ini jelas ditujukan untuk membatasi jumlah bumiputra yang bisa bersekolah di ELS, sebab pendapatan rata-rata buruh bumiputera hanya sebesar 0,25 gulden per hari. Hanya anak-anak para pegawai tinggi bumiputra yang bisa bersekolah di ELS (Pratama, 2012: 50).

Kaum bumiputra lebih dulu memperoleh sekolah. Pada 1911, sebuah sekolah dasar untuk golongan bumiputra mulai beroperasi di Balikpapan. Sekolah ini berstatus partikelir (swasta) dan netral atau tidak berdasar pada agama tertentu (*Algemeen Verslag van het Inlandsch Onderwijs*, 1912, . 111). Mengacu pada laporan F.L. van Driest, kontrolir Afdeling Balikpapan pada 1931, sekolah tersebut adalah milik BPM dan setara dengan Sekolah Kelas Dua (*Tweede Klasse School*) milik pemerintah (Van Driest, 1931: 22). Pemerintah kolonial baru mendirikan HIS (*Hollandsch-Inlandsche School*) di Kota Minyak pada 1928 (Pratama, 2011: 49-50).

Selain itu juga berdiri sekolah-sekolah Tionghoa milik swasta. Pada 1931, terdapat tiga sekolah Tionghoa di Balikpapan. Sekolah pertama terletak di Klandasan dan dikelola oleh Tiong Hwa Hwee Kwan (THHK). Sekolah kedua diperuntukkan bagi komunitas Tionghoa Hainan. Letak persisnya belum diketahui. Adapun sekolah yang ketiga terletak di Pandansari dan menampung mereka yang tidak bisa masuk Sekolah THHK karena terkendala jarak (Van Driest, 1931: 22).

Tak hanya sekolah, kawasan hunian para buruh juga terbagi dalam sekat-sekat rasial meski sama-sama tinggal di lahan konsesi BPM. Hampir semua kawasan hanya dihuni oleh kelompok tertentu. Klandasan, misalnya, dikhususkan bagi pegawai Eropa sekaligus menjadi kawasan dengan fasilitas paling lengkap. Di sana terletak ELS, *societeit* (gedung perkumpulan), lapangan sepak bola, lapangan tenis, dan lainnya. Selain itu, wilayah lain yang seluruhnya dihuni pegawai Eropa adalah Gunung Balikpapan (*Balikpapan-beuvel*), Gunung Pancur (*Pantjoer-beuvel*), dan Kampung Baru (Van Driest, 1931: 6).

Adapun kawasan-kawasan yang secara penuh dihuni oleh buruh bumiputra mencakup Prapatan, Pandansari, dan Karang Anyar. Prapatan dan Karang Anyar secara bersama dihuni oleh para kuli dan kerani, sedangkan Pandansari didominasi oleh kuli. Meski begitu, beberapa bangsal untuk kerani juga dapat ditemui di sana. Satu-satunya pengecualian adalah Gunung Teknik (*Technische-beuvel*) yang terbagi antara rumah-rumah pegawai Eropa dan bangsal-bangsal buruh bumiputra (Van Driest, 1931: 6).

Kesenjangan ini terus bertahan, bahkan setelah berakhirnya

kekuasaan Jepang di Balikpapan. Pada awal revolusi, tepatnya pada 10 November 1946, Siebold Mewenggang dari Serikat Kaoem Boeroeh (SKB) menuntut BPM agar kenaikan gaji hanya berlaku pada pegawai rendahan, bukan semua pegawai. Alasan utamanya adalah karena jika gaji dinaikkan bagi semua pegawai, maka pegawai Eropa sangat diuntungkan. Mereka, yang berpenghasilan sekitar *f*200 (200 gulden), kini memperoleh kenaikan 50 persen. Ini tidak adil bagi buruh bumiputra yang penghasilannya hanya setengah dari pegawai Eropa (Sulistyo, 2013: 156).

Walau Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, nyatanya perusahaan-perusahaan mereka tetap merajai ekonomi Indonesia. Alhasil, Indonesia sulit mencapai kedaulatan ekonomi nasional (K anumoyoso, 2001: 18). Keberadaan BPM/Shell di Balikpapan pada dasawarsa kelima dan keenam mencerminkan hal ini.

Berkaca pada kesenjangan di Balikpapan—khususnya di kalangan buruh minyak—pada masa kolonial, penulis mengajukan dua pertanyaan. Pertama, bagaimana dinamika kesenjangan di kalangan buruh minyak di Balikpapan pada masa pasca-kolonial? Kedua, bagaimana reaksi kaum buruh terhadap kesenjangan tersebut? Rentang waktu yang menjadi fokus utama penelitian bermula dari tahun 1950 hingga 1965.

Sekalipun terjadi perbedaan perlakuan—dan penggunaan istilah dalam artikel ini—antara pegawai kulit putih (karena mereka biasanya berstatus manajer atau kepala bagian) dan buruh Indonesia (termasuk buruh Tionghoa), status mereka yang sejatinya sama-sama pekerja perusahaan membuat kedua golongan ini tetap tergolong sebagai buruh minyak. Perlu ditegaskan pula bahwa yang dimaksud dengan buruh minyak dalam artikel ini adalah para buruh atau pegawai BPM/Shell.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penggunaan istilah “BPM”, “Shell”, dan “BPM/Shell”. “BPM” akan digunakan pada periode sebelum 1960. Mulai tahun 1960 dan setelahnya, maka “Shell” atau “PT Shell Indonesia” akan digunakan, walau kata “Shell” selalu merujuk pada PT Shell Indonesia selaku anak perusahaan Royal Dutch Shell plc. Adapun “BPM/Shell” hanya digunakan pada saat-saat tertentu untuk menegaskan kontinuitas antara kedua perusahaan tersebut, tepatnya antara BPM dengan PT Shell Indonesia.

Pada 1950, tepatnya pada 23 Maret 1950, Kalimantan Timur yang sebelumnya berstatus sebagai negara federal bergabung dengan Republik Indonesia (Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, 1992: 128). Meski begitu, sebagian besar perekonomian di Kalimantan Timur masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan Belanda seperti BPM. Alhasil, sifat kolonial yang melekat dengan diskriminasi masih tetap bertahan, seperti yang akan dijelaskan kemudian. Tahun 1965 menjadi titik akhir kajian sebab pada 22 Juni 1965, Shell menyerahkan kilang minyak Balikpapan kepada PN Permina, menandai akhir hegemoni mereka di pantai timur Kalimantan (*Harian Rakjat*, 22 Juni 1965). Balikpapan menjadi fokus spasial penelitian karena dua hal: statusnya sebagai salah satu pusat industri minyak di Indonesia sekaligus adanya ikatan batin penulis dengan kota tersebut.

Kajian-kajian yang membahas tentang kesenjangan di kalangan

buruh minyak Balikpapan bisa dihitung dengan jari. Dua contohnya adalah skripsi Akhmad Ryan Pratama dengan judul *Industri Minyak di Balikpapan Dalam Lintasan Kekuasaan 1900-1966* yang ditulis pada 2012 dan buku Burhan Djabir Magenda berjudul *East Kalimantan: The Decline of a Commercial Aristocracy* yang terbit pada 1991. Keduanya sama-sama membahas tentang ketimpangan rasial yang terjadi di Balikpapan pada masa kolonial. Dalam hal ini, pemaparan Pratama jauh lebih rinci daripada yang diberikan oleh Magenda. Meski begitu, keduanya masih belum menguraikan secara penuh dan mendalam ketimpangan di kalangan buruh minyak dan reaksi mereka atas hal tersebut di Balikpapan yang menjadi tujuan utama penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Menurut Kuntowijoyo, metode sejarah mempunyai lima tahapan, yakni (1) pemilihan topik, (2) heuristik, (3) verifikasi, (4) interpretasi, dan (5) penulisan (Kuntowijoyo, 2018, . 69). Baik sumber primer maupun sekunder digunakan dalam kajian ini. Sumber-sumber primer yang digunakan berupa surat, laporan, dan artikel surat kabar yang sezaman. Adapun sumber sekunder yang digunakan berupa buku dan skripsi.

Peneliti memperoleh sumber primer dari berbagai tempat. Sebagian diperoleh secara daring melalui laman web Nationaal Archief dan Delpher. Untuk koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), peneliti melakukan penggandaan secara daring, sehingga memperoleh bentuk digital dari dokumen yang diperlukan. Khusus untuk artikel-artikel *Harian Rakjat*, peneliti berkunjung langsung ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI di Jakarta. Untuk sumber sekunder, peneliti memperoleh sebagian secara daring melalui Google Books atau laman web lainnya. Sebagian lain diperoleh dengan mengunjungi berbagai perpustakaan di Yogyakarta, seperti Perpustakaan Universitas Islam Indonesia (UII), atau membeli buku yang diperlukan.

Kesenjangan di Masa Pasca-Kolonial

Wilayah konsesi BPM bagaikan “negara dalam negara”. Memang, terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara wilayah itu dengan kawasan sekitarnya, atau biasa disebut “wilayah republik”. Pertama, akan disajikan laporan Martomo, seorang wartawan *Kedaulatan Rakyat* yang mengunjungi Balikpapan pada awal Juni 1956. Laporan itu berjudul “Balikpapan selang pandang: Diskriminasi jang menjolok mata” dan terbit di *Kedaulatan Rakyat* edisi 21 Juni 1956. Berikut tulis Martomo,

“Kesan pertama dari wartawan tuan di Balikpapan, jalah bahwa kami disana seolah2 di negeri Asing. Balikpapan jang terletak diteluk Balikpapan itu betul2 merupakan kota BPM. Perbedaan antara daerah BPM dan RI sangat terasa. Didaerah BPM kami bisa melihat rumah2 employe jang mentereng, dengan interieurnja jang bagus2 serba mewah, pekarangan2 jg indah teratur. Pendeknja semuanya serba baik. Djuga pada malam hari kelihatan sekali perbedaannja. Kalau didaerah BPM pada malam hari kami melihat tjahaja lampu listrik jg kerdap-kerdip gemerlapan menambah keindahan kota minjak itu, maka didaerah RI penerangan sangat terbatas. Kabarnja itu memang politik

BPM untuk menundukkan kekuasaannya di sana. Djuga djalan2 di kedua bagian itu sangat berlainan. Dibagian atas, jaitu daerah BPM djalan2 “serba litjin, bersih dan bagus. Ada sebuah djalan jang dinamakan ‘djalan Minjak’ (kini Jalan Yos Sudarso—pen) dan 4½ Km. pandjangnja itu, dibikin sedemikian rupa, sehingga “memperingatkan kami pada gambar2 djalan di Amerika Serikat jang hebat2 seperti banjak dimuat dalam madjalah2 Life dll. Jang bersifat propaganda. Sebaliknja djalan2 didaerah RI sebagian besar masih dalam keadaan menjedihkan.”

Mengenai hal ini, Martomo bukan satu-satunya yang mengkritik. Bahkan, surat kabar *Java Bode* yang berbahasa Belanda pun mengungkapkan hal serupa lima tahun sebelumnya. Surat kabar itu mengakui bahwa keadaan di luar kompleks BPM jauh dari kata memuaskan. Sekalipun pemerintah kota telah berupaya memoles penampilan kota, akan tetapi pembangunan yang terjadi hanya dipusatkan pada kompleks perumahan untuk para pegawai negeri (*Java Bode*, 18 September 1951).

Tak lupa Martomo menceritakan diskriminasi yang terjadi di kalangan buruh BPM sendiri. Mengenai hal tersebut, ia menulis,

“Mitsalnja golongan Indonesia tidak boleh mandi di tempat pemandian Belanda, berolahraga dilapangan olahraga mereka, bermain tennis dibaen (lapangan tenis—pen) mereka. Semuanja serba disendirikan. Tetapi semua itu dibikin sedemikian rupa supaja mereka (golongan Indonesia) puas, sehingga tidak merasa, bahwa mereka itu sebetulnja alat² belaka untuk mentjari keuntungan BPM jg berdjuta2 djumlahnja setahunnja itu.”

Pada 28 Maret 1958, perwakilan Shell di Jakarta mengumumkan pendirian sebuah anak perusahaan baru di Indonesia, PT Shell Indonesia. Seluruh aset dan tenaga kerja BPM akan diambil alih oleh anak perusahaan ini setelah akta pendiriannya mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman (*Algemeen Handelsblad*, 28 Maret 1958). Namun, baru pada Maret 1960, Menteri Kehakiman menyetujui pendirian PT Shell Indonesia yang berpusat di Jakarta. Anak perusahaan ini didirikan oleh Canadian Shell Ltd yang berpusat di Ontario dan Shell Overseas Exploration Co. di London (*Trouw*, 10 Maret 1960). Para pegawai Belanda diganti dengan orang-orang Inggris (Pratama, 2012: 175).

Sekalipun demikian, segregasi ras di kalangan buruh tetap saja bertahan. Keterangan ini dapat ditemukan dalam artikel berjudul “Sahkan Garapan Rakjat Diatas Tanah Konsesi” yang dimuat dalam *Suara Tani*, majalah Barisan Tani Indonesia (BTI), edisi Juli 1961. Artikel ini merupakan sebuah laporan yang ditulis oleh Hamdi (dalam artikel asli tertulis “Handi”), seorang anggota MPRS dari BTI, yang menghadiri seminar *land reform* Provinsi Kalimantan Timur pada 22-27 Juni 1961 di Balikpapan. Dalam artikel itu, Hamdi menulis (Handi, 1961),

“Kalau ada anggapan, bahwa BPM ikut membikin indah kota Balikpapan, sebenarnja anggapan itu keliru sekali. Karena jang dibikin indah itu hanja kompleks BPM memang tjukup sjarat²

sadja. Perumahannja kesehatannja. Tiap rumah 1 mobil plus garasinja. Tapi ini hanja untuk orang² Belanda dan Inggris jang mendjadi pangkat tinggi BPM. Untuk mereka disediakan tempat matjam² olahraga. Bioskopnja khusus hanja untuk employe jang nontonnja harus memakai dasi. Djalan²nja aspal jang lebih baik daripada di ibu-kota.”

Selain itu, Hamdi juga menulis tentang nasib buruh kecil, terutama buruh yang terkena pemecatan, dan pensiunan BPM/Shell kerap kali kesulitan mendapat tanah dari perusahaan untuk mendirikan rumah karena tidak punya tempat tinggal tetap. Padahal, sebagian besar lahan konsesi perusahaan diterlantarkan begitu saja. *“Modal asing terutama BPM mempunyai konsesi tanah seluas 1800 Ha. Banjak tanah konsesinja diterlantarkan. Tapi djika kaum buruh ketjil, pensiunan BPM jang tidak punya rumah mengajukan permintaan tanah kepada BPM untuk mendirikan rumah selalu ditolak.”* (Handi, 1961)

Soehario Padmodiwirio alias Hario Kecik, Pangdam IX/Mulawarman periode 1960-1965, dalam otobiografinya menceritakan sebuah insiden yang terjadi di bioskop milik Shell. Suatu malam, Kepala Polisi Kalimantan Timur, Komisaris Besar Syamsudin, hendak menonton film di bioskop milik Shell. Di dalam bioskop memang disediakan kursi-kursi khusus untuk pejabat tinggi sipil dan militer. Akan tetapi, pada malam itu seorang kelasi kapal tanker berkebangsaan Inggris justru duduk di kursi yang diperuntukkan bagi pejabat. Saat Syamsuddin memintanya pergi, ia menolak. Alhasil, timbul kegaduhan. Kombes Syamsuddin yang marah menggunakan wewenangnya untuk menghentikan pertunjukan film (Padmodiwirio, 1995: 565). Peristiwa itu terjadi pada 23 Agustus 1960. Namun, menurut pemberitaan saat itu, yang memberi perintah penutupan adalah Kepala Polisi Resort Kutai yang tidak disebut namanya, bukan Syamsuddin. Selain itu, penyebab kericuhan tidak hanya seorang Inggris, melainkan beberapa orang yang menduduki kursi-kursi yang telah dipesan oleh rombongan Kombes Syamsuddin (*Harian Rakjat*, 12 September 1960).

Hario memaparkan lebih jauh alasan di balik kemarahan Syamsuddin. Orang Inggris yang menduduki kursinya tidak mengenakan dasi, meski di bioskop terdapat peraturan yang mengharuskan para pegawai yang menonton mengenaikannya. Para pegawai Indonesia menaatinya, berbeda dengan orang-orang Inggris yang sering melanggarnya. Parahnya, tidak pernah ada tindakan tegas terhadap mereka. Adapun jika yang melanggar seorang Indonesia, ia dipaksa untuk memakai dasi yang telah disediakan atau jika enggan, dilarang untuk memasuki ruang pertunjukan (Padmodiwirio, 1995: 566).

Di dalam otobiografinya, Hario juga menuliskan contoh kasus lain seputar diskriminasi yang dialami buruh berkebangsaan Indonesia. Pada suatu hari, para buruh Indonesia melihat seorang ahli teknik berkulit putih merokok di tempat yang dilarang untuk merokok. Memang, di kawasan Shell terdapat tempat-tempat tertentu di mana orang dilarang merokok karena adanya resiko yang besar seperti ledakan gas. Mereka yang melanggar

biasanya langsung dipecat. Saat ahli teknik tadi ditegur, ia bersikap arogan dan menjawab, “saya kan lebih tahu!” Saat kaum buruh menuntut agar ia dipecat, pihak Shell justru mengancam akan menindak mereka karena mengancam akan mogok untuk memperkuat bobot tuntutan mereka (Padmodiwirio, 1995: 564).

Ada juga kasus di mana seorang buruh Indonesia mati karena terlindas mobil perusahaan. Pengemudinya, seorang pegawai berkulit putih, bebas dari tuntutan jaksa. Buruh yang terlindas tadi dianggap bersalah dengan alasan dia tetap berjongkok saat mobil mundur dan sang pengemudi tidak melihatnya. Hario juga mengisahkan bagaimana para pegawai Inggris sering meminta polisi (yang tentunya orang Indonesia) pada malam hari untuk menenangkan anjing kampung yang menggonggong di sekitar rumah mereka (Padmodiwirio, 1995: 563). Perbedaan perlakuan juga berlaku di antara buruh minyak Indonesia, yakni antara pegawai bulanan dan harian. Sejak 1957, BPM (dan nantinya Shell) di Kalimantan membedakan fasilitas sosial bagi keduanya, terutama seputar pajak (*Harian Rakjat*, 21 Agustus 1964). Sayang belum dapat ditemukan rincian mengenai peraturan tersebut.

Para buruh Indonesia juga mendapat ejekan lisan dari atasan bule mereka. Misal, pada 17 September 1953, W. Groen selaku kepala bagian perkapalan BPM melontarkan dua kalimat kepada bawahannya di Jembatan Tujuh yang merendahkan mereka. Kedua kalimat itu adalah “kalau saya kasih berhenti orang kapal, nanti makan kayu semua” dan “orang-orang Indonesia sudah tinggi, mau tinggi lagi” (Surat DPT Perbum kepada NV De BPM di Balikpapan, 21 September 1953).

BPM/Shell enggan menyerahkan kendali atas kilang minyak Balikpapan kepada para pegawai Indonesia. Saat sentimen anti-Belanda memuncak pada akhir 1957, BPM mengumumkan wacana indonesianisasi. Per Oktober 1957, sebanyak 60 persen pegawai di Balikpapan adalah orang Indonesia. BPM juga melatih para pegawai Indonesia mereka dengan menyekolahkan mereka disertai bantuan beasiswa. Sebanyak Rp2 juta dikucurkan untuk program ini (*Algemeen Indisch Dagblad de Preangerbode*, 31 Oktober 1957).

Setahun kemudian, terbukti bahwa BPM setengah hati, bahkan berubah hati, menjalankan proses indonesianisasi di Balikpapan. Alih-alih mengindonesianisasikan staf mereka, para pegawai Belanda justru diganti dengan pegawai berkebangsaan Inggris. Para pegawai Indonesia kini wajib mempelajari Bahasa Inggris. Bahasa itu juga digunakan dalam pembukuan perusahaan. Sebaliknya, para pegawai Inggris sama sekali tidak diwajibkan mempelajari Bahasa Indonesia. Akibatnya, terjadi kesalahpahaman di mana seorang pegawai Inggris bernama G.P. Burn dipukul oleh seorang pegawai Indonesia (*Sin Po*, 14 November 1958).

Buruh Indonesia Kontra Kesenjangan

Menghadapi kesenjangan ini, para buruh Indonesia tidak tinggal diam. Sebagian besar buruh Indonesia tergabung dalam serikat-serikat buruh seperti Perbum (Persatuan Buruh Minyak) dan SKBM (Serikat Kaum

Buruh Minyak) membuat mereka berani menghadapi ketidakadilan. Misal, pada kasus W. Groen, kaum buruh perkapalan tidak bertindak gegabah dengan menyerang Groen secara fisik. Mereka menyerahkan perkara ini kepada Perbum yang dalam gilirannya melayangkan sebuah surat protes kepada BPM di Balikpapan. Surat tertanggal 21 September 1953 itu memprotes keras tindakan Groen karena perkataannya yang menghina Bangsa Indonesia. Perbum Balikpapan juga menuntut agar Groen segera dipecat karena tindakannya (Surat DPT Perbum kepada NV De BPM di Balikpapan, 21 September 1953).

Dua tahun sebelumnya, tepatnya pada 19 Februari 1951, atas arahan dari KABM (Kesatuan Aksi Buruh Minyak) Pusat hendak diselenggarakan aksi mogok di Balikpapan yang dipicu oleh negosiasi antara KABM dengan BPM yang mandek. Sejak 22 Januari, KABM berunding dengan BPM dan mengajukan tuntutan mengenai berbagai hal, seperti *verlof* (cuti), uang pensiun, upah pokok sejumlah Rp7.350, dan *toelage* (uang waledan). Namun, yang paling menarik adalah KABM juga menuntut penghapusan diskriminasi ras di lingkungan BPM (*Nasional*, 15 Februari 1951). Sayang, aksi ini batal terjadi karena KABM Pusat didesak oleh PAM (Pengawas Aliran Masyarakat, suatu bagian dari Djawatan Kepolisian Negara RI/DKN) untuk menarik seruan mogok (*Sin Po*, 19 Februari 1951).

Para pegawai Indonesia juga tak tinggal diam menghadapi pengingkaran BPM terhadap wacana indonesianisasi. Siebold Mewengkang selaku ketua SKBM Kalimantan melayangkan surat protes yang disampaikan pada pemerintah dan organisasi-organisasi buruh minyak lainnya. Surat ini mempertanyakan tindakan BPM, seperti yang telah dipaparkan di atas, yang seolah-olah hendak menginggriskan perusahaannya alih-alih menjalankan proses indonesianisasi seperti yang diinginkan pemerintah Indonesia (*Sin Po*, 14 November 1958). Mengenai perumahan bagi para buruh kecil dan pensiunan BPM/Shell, dalam seminar *land reform* tanggal 22-27 Juni 1961 di Balikpapan, sebuah resolusi dikeluarkan oleh BTI, Petani (Persatuan Tani Nasional Indonesia, serikat tani PNI), dan Pertanu (Persatuan Tani Nahdhatul Ulama) menuntut pemerintah agar mencabut hak Shell atas lahan konsesi yang diterlantarkan dan diberikan kepada para pensiunan dan buruh yang dipecat untuk dijadikan lahan perumahan (*Suara Tani*, Juli 1961: 7).

Meski begitu, tidak banyak perkembangan yang terjadi hingga akhir 1962. Pada Desember 1962, Panitia 1 Mei Front Nasional Kotapraja Balikpapan yang terdiri dari berbagai serikat buruh minyak, terutama Perbum, menuntut agar Shell tidak menambah jumlah pegawai asing mereka. Apabila ada pegawai asing yang berhenti atau harus diganti, penggantinya haruslah pegawai berkebangsaan Indonesia (*Merdeka*, 29 Desember 1962). Baru pada September 1963, terjadi gebrakan besar.

Pada 16 September 1963, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan “konfrontasi” dengan Malaysia. Di hari yang sama, lebih dari 5.000 buruh minyak di bawah arahan Pengurus Daerah Front Nasional (PDFN) Kalimantan Timur memboikot orang-orang Inggris dan berusaha mengambil alih kilang minyak Shell di Balikpapan. Meski

begitu, penyulingan dan produksi terus berjalan (*Harian Rakjat*, 20 September 1963). Tak hanya buruh minyak saja yang terlibat. Para pelayan rumah tangga juga turut serta. Berdasarkan keterangan Margaret, istri G. Glendenings (manajer Shell di Balikpapan) mereka mendapat komando dari “seorang pria kecil dengan tongkat” (*The Straits Times*, 3 Oktober 1963). Mereka semua menolak melayani dan berbicara dengan para pegawai Inggris (*Gerakan Perbum*, 1972: 59).

Aksi itu juga diwarnai dengan corat-coret slogan anti-Inggris pada mobil dan rumah milik pegawai asing Shell. Sebagian dari corat-coret tersebut bertuliskan “ganyang Malaysia”, “usir imperialis”, dan “sita modal asing” (*Gerakan Perbum*, 1972, 59). Para pegawai Inggris dilarang pergi bekerja (Redfern, 2010, 217). Meski sasaran utama adalah para pegawai Inggris, namun beberapa rumah staf senior Indonesia juga mendapat coretan intimidatif seperti “ganyang kaki-tangan asing” (*Gerakan Perbum*, 1972: 59).

Keesokan harinya, Brigjen Soehario selaku panglima mengumumkan bahwa semua aset Shell di Balikpapan telah “diamankan”. Tak hanya kilang minyak, organisasi koperasi BPM/Shell yakni CIVO (Centrale Inkoop-Verkoop Organisatie) juga diambil alih (*The Straits Times*, 3 Oktober 1963). Sebanyak 66 pegawai asing Shell yang seluruhnya adalah pengurus Shell di Balikpapan, secara resmi dilarang bekerja dan dikenai tahanan rumah (Redfern, 2010: 218). Untuk sementara waktu, kepengurusan Shell di Balikpapan berada di tangan para pimpinan serikat buruh (Sulistyo, 2013: 168).

Perlu diketahui bahwa ketua umum Front Nasional Kalimantan Timur saat itu adalah Soehario sendiri (Padmodiwirio, 1995: 591). Jadi, dialah yang mengarahkan buruh minyak untuk mengambil alih operasi Shell di Balikpapan. Soehario sendiri sejak awal menentang dominasi Shell di Kalimantan Timur. Dalam memoarnya sebagaimana telah dikutip, ia banyak sekali mengkritik kesenjangan sosial yang terjadi di Balikpapan, khususnya di wilayah konsesi Shell. Selain itu, ia juga dekat dengan kelompok kiri, seperti PKI dan Murba (Magenda, 1991: 55).

Pengambilalihan kilang minyak Balikpapan sejatinya dilatarbelakangi oleh keadaan politik saat itu, yakni konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Meski begitu, kesenjangan sosial yang terjadi, baik di kalangan buruh minyak maupun warga kota lainnya, juga menjadi faktor pendorong tindakan tersebut. PKI menjadi pihak yang paling vokal menggaungkannya, bahkan sejak September 1959. Hal ini tampak dalam pidato yang diucapkan Sayid Fachrul Baraqbah, sekretaris (ketua) Komite Daerah Besar PKI Kalimantan Timur, saat Kongres Nasional PKI ke-VI pada 7-14 September 1959 di Jakarta. Berikut kutipan pidatonya (*Bintang Merah*, 1960, 501),

“Disamping itu belum beranija Pemerintah meng-utik² modal Belanda yang ditanam dalam perusahaan minyak BPM yang di beberapa kota di Kalimantan Timur merupakan salah satu sumber dan landasan kekuatan daripada imperialisme Belanda dan golongan kepala batu. Tidak jauh bedanja nasib daripada tam-

bang² batu bara di sekitar sungai Mahakam dan di daerah Berau. Karena ragu²nja Pemerintah mengambil alih perusahaan tersebut, menjadi rebutan di kalangan kaum spekulasi, membawa akibat bahwa ribuan kaum buruh dengan keluarganya mengalami nasib yang terlantar yang dapat mempengaruhi penghidupan Rakyat lainnya.”

Perihal ini kembali disinggung oleh Fachrul dalam pidatonya yang berjudul “Kalimantan Timur dan MPRS” saat sidang pertama MPRS yang berlangsung dari 10 November hingga 7 Desember 1960 di Bandung. Seperti pidato sebelumnya, Fachrul menyoroti dampak negatif dominasi modal asing, terutama Shell, di Kalimantan Timur terhadap kesejahteraan rakyat setempat. Transisi dari BPM ke PT Shell Indonesia sebagai reaksi atas konflik Irian Barat dikecam keras. *Massa-ontslag* (kini dikenal dengan istilah PHK massal) yang dilakukan Shell ditentang karena merugikan kaum buruh Indonesia. Fachrul juga mengungkapkan kesulitan warga Balikpapan dalam mengakses minyak sekalipun kilang-kilangnya tidak jauh dari rumah mereka. Berikut kutipan dari sebagian isi pidato dalam bentuk poin-poin (*Harian Rakjat*, 30 Desember 1960),

“2. Penggantian nama BPM dengan ‘PT Shell Indonesia’ mempunyai opset untuk menjembunikan modal Belanda yang ada dalam perusahaan tumpang itu, tentunya disebabkan kekuatiran akan pendirian dari Manipol dalam persoalan Irian Barat.

3. Massa-ontslag masih tetap berlaku yang berarti merugikan kaum buruh kita yg oleh Manipol dikatakan sebagai salahsatu sokoguru masyarakat adil dan makmur.

4. Tiada berapa djauh dan beberapa puluh meter sadja dari tengki2 minjak asing ini Rakjat berdjedjal2 antri minjak kadang2 berpanas dan kehudjanaan”

Konferensi PKI Kalimantan Timur yang diselenggarakan pada pertengahan April 1962 mengeluarkan resolusi yang mendesak pemerintah agar segera menyita semua modal Belanda di Indonesia, terutama BPM, karena “semakin berkepala batunya Belanda untuk mempertahankan pendjadjahannya di Irian Barat” (*Harian Rakjat*, 21 April 1962). Barulah pada 29 Maret 1963, Front Nasional Kalimantan Timur—yang terdiri dari berbagai elemen politik—menyerukan pengambilalihan aset Shell di Indonesia apabila Inggris “terus berkepala batu membantu Tengku Abdurrahman untuk menindas gerakan Rakjat Kalimantan Utara dan memusuhi Republik Indonesia” (*Harian Rakjat*, 29 Maret 1963).

Pada 21 September 1963, Brigjen Soehario diangkat oleh Chaerul Saleh selaku Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan (Perdatam) Indonesia menjadi komisaris pemerintah untuk PT Shell Indonesia di Balikpapan. Adapun Ir. Atung Kontawa selaku ketua Tim Pengawasan Minyak Deperdatam Balikpapan ditunjuk sebagai wakil komisaris (*Harian Rakjat*, 23 September 1963). Chaerul Saleh juga membentuk Tim Pengamanan Minyak dan Gas Bumi Deperdatam yang tunduk pada

Soehario selaku komisaris. Tim itu beranggotakan 21 orang dan terdiri dari berbagai unsur, seperti pejabat pemerintah provinsi, Tim Pengawas Minyak yang berbasis di Balikpapan, para perwira Angkatan Kepolisian dan Kodam IX/Mulawarman, perwakilan buruh Shell Balikpapan, dan unsur-unsur Front Nasional Kalimantan Timur. Tim tersebut bertugas untuk mengamankan dan mengawasi aset-aset Shell di Balikpapan, termasuk lapangan minyak, kilang minyak, dan peralatan lainnya (*Harian Rakjat*, 23 September 1963).

Para manajer Inggris sejak 17 September praktis berada dalam tahanan rumah dan dilarang menghubungi dunia luar, sehingga tidak ada yang tahu nasib mereka hingga pada 23 September ketika surat dari seorang manajer Shell yang diselundupkan berhasil tiba di meja Howard Palfrey Jones, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Mereka juga dilarang bekerja. Keadaan ini berubah pada 25 September saat Jenderal Ahmad Yani selaku Menpangad (Menteri Panglima Angkatan Darat), setelah dilobi oleh Shell yang sedang menyelesaikan Perjanjian Karya (kelak menjadi UU Nomor 14 Tahun 1963) dengan pemerintah Indonesia, memerintahkan Soehario agar melepaskan para pegawai Inggris dari tahanan rumah (Redfern, 2010: 239).

Pada 28 September, semua pegawai asing diizinkan untuk kembali bekerja. Perubahan hati ini disebabkan oleh kedatangan tim KOTI (Komando Operasi Tertinggi) ke Balikpapan di hari yang sama untuk memastikan agar perintah tanggal 25 September itu terlaksana. Kepala Staf KOTI tidak lain dijabat oleh Yani sendiri. Namun, Soehario tak berniat untuk tunduk sepenuhnya. Pada 30 September, sebelum meninggalkan Balikpapan, ia menunjuk sebuah tim yang terdiri dari 13 orang asisten komisaris. Merekalah yang kelak praktis memegang kendali perusahaan, termasuk para pegawai asing Shell (Redfern, 2010: 240).

Kontak antara pegawai asing dengan pegawai Indonesia hanya boleh melalui perantara tim komisaris. Para pegawai asing dilarang menelpon satu sama lain kecuali melalui perwakilan Front Nasional. Para dokter asing juga tidak diperbolehkan memerintah staf mereka yang berkebangsaan Indonesia. Kontak dengan dunia luar sangat dibatasi dan walau secara resmi para manajer asing tetap dilibatkan, nyatanya mereka tidak diizinkan membuat keputusan. Kepemimpinan perusahaan secara praktis diambil alih oleh tim asisten komisaris. Per 30 September, tidak ada lagi perubahan dalam komposisi pegawai Indonesia (Redfern, 2010: 240-241).

Walau kilang minyak Balikpapan secara riil berada di bawah kendali Front Nasional Kalimantan Timur, secara resmi kepemilikannya tetap berada di tangan Shell. Hal ini ditegaskan dengan istilah yang digunakan untuk menggambarkan aksi pada 16-17 September 1963. Alih-alih menggunakan istilah “nasionalisasi” atau “pengambilalihan”, istilah yang digunakan adalah “pengamanan” (*Harian Rakjat*, 20 dan 23 September 1963). Karenanya, KBKI (Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia), SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), SKBM, Perbum, dan Serbumit (Serikat Buruh Minyak dan Tambang) di Balikpapan mengeluarkan pernyataan bersama yang disampaikan kepada Brigjen

Ibnu Sutowo, saat itu Kepala Direktorat Minyak dan Gas Bumi, pada 16 November 1963 saat kunjungannya ke kota itu mewakili Menteri Perdatam untuk mendesak pelaksanaan indonesianisasi PT Shell Indonesia dengan dalih bahwa kaum buruh Indonesia sanggup meneruskan usaha tanpa bantuan orang asing (*Harian Rakjat*, 16 Desember 1963). Seruan serupa juga digaungkan saat Konferensi SOBSI Balikpapan pada 24-25 November 1963 (*Harian Rakjat*, 14 Desember 1963).

Keadaan ini baru berakhir pada 21 Desember 1963, saat tim manajemen Shell yang baru tiba di Balikpapan. Setelah melalui negosiasi yang alot selama dua bulan, Shell berhasil kembali menguasai aset-aset mereka di Balikpapan setelah mengganti komposisi staf manajer mereka dari 66 pegawai Inggris menjadi 27 pegawai Indonesia, 34 pegawai asing non-Inggris, dan menghapus lima jabatan yang diduduki oleh pegawai asing. Tim pengawas yang dibentuk Chaerul Saleh pada 21 September dihapus pada 18 Desember (Redfern, 2010: 241-243). Namun, kemenangan Shell tak bertahan lama.

Pada 20 Januari 1964, Kesatuan Aksi Buruh Minyak (KABM) seluruh Indonesia secara serentak menyatakan pengambilalihan seluruh aset PT Shell Indonesia di seantero negeri, termasuk kilang minyak di Balikpapan. KABM sendiri terdiri dari tujuh serikat buruh, yaitu Perbum, SKBM, KBM, KBKI (Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia—sempalan dari Kesatuan Buruh Marhaenis/KBM), SBMSI (Serikat Buruh Minyak Shell Indonesia), SBMM (Serikat Buruh Minyak Merdeka), dan Serbumit (*Harian Rakjat*, 21 Januari 1964; *Warta Bhakti*, 20 Januari 1964). Baru tiga hari kemudian, pengambilalihan Shell Balikpapan dilaksanakan atas nama KABM (*Gerakan Perbum*, 1972: 60).

Baru kini, buruh minyak Indonesia sepenuhnya memegang kendali atas kilang minyak Balikpapan. Mereka membentuk sebuah badan pimpinan baru yang berasal dari berbagai serikat buruh, seperti Perbum (berafiliasi dengan PKI), KBM (berafiliasi dengan PNI), Serbumit (Serikat Buruh Minyak dan Tambang, bercorak Islam), SOBRI (Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia, berafiliasi dengan Partai Murba), dan SKBM (Serikat Kaum Buruh Minyak, independen). Semuanya tergabung ke dalam satu wadah yang bernama KSOBM (Kerja Sama Organisasi Buruh Minyak). Mereka sepakat menyatakan diri hanya mau tunduk pada Dewan Pimpinan Perusahaan Pusat bentukan KABM (*Warta Bhakti*, 10 Februari 1964).

Sejak awal, pemerintah pusat Indonesia menentang aksi KABM. Pada hari pertama aksi, Wakil Perdana Menteri II (Waperdam II) Johannes Leimena segera menyeru agar rakyat “tidak mengambil tindakan² sendiri” (*Warta Bhakti*, 20 Januari 1964). Pada 31 Januari 1964, Chaerul Saleh mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan Inggris akan diambil alih secara perlahan dan teratur dalam jangka waktu 10 bulan. Meski begitu, Shell termasuk yang dikecualikan (Redfern, 2010: 302). Semua ini bertujuan untuk mencegah gangguan terhadap kegiatan perusahaan asing akibat aksi-aksi yang dilancarkan oleh

serikat buruh, terutama yang berafiliasi dengan PKI (Redfern, 2010: 303).

Alhasil, pada 3 Maret 1964, KABM mengadakan pembicaraan dengan pemerintah di Jakarta mengenai status Shell. KABM tetap gigih memperjuangkan aksi pengambilalihan yang telah dilakukannya. Namun, di sisi lain, KABM menyatakan diri dapat memahami apabila pemerintah Indonesia menganggap bahwa belum waktunya Shell diambil alih (*Harian Rakjat*, 3 Maret 1964). Secara perlahan, manajemen Shell kembali menguasai kilang minyak di Balikpapan. Hanya saja, kali ini tidak ada satu pun pegawai Inggris. Mereka digantikan oleh orang-orang Amerika, Prancis, Venezuela, Jerman Barat, dan lainnya (*Harian Rakjat*, 8 Juni 1964).

Pembedaan di kalangan buruh Indonesia, tepatnya antara mereka yang pegawai bulanan dan harian, yang berlaku sejak 1957 kembali diterapkan. Kaum buruh tentu saja tidak puas melihat tatanan lama kembali berlaku. A.M. Soroinsong dan B. Djamil selaku perwakilan buruh Shell Kalimantan melaporkan hal tersebut kepada Pengurus Besar Front Nasional (PBFN) di Jakarta pada 18 Juni 1964 pagi. Meski begitu, respon yang mereka peroleh sangat terbatas. Mohamad Djambek, Wakil Sekretaris Jenderal PBFN, hanya bisa berjanji akan membawa laporan mereka ke dalam rapat pimpinan Sekretariat PBFN untuk diteruskan kepada pemerintah (*Harian Rakjat*, 21 Agustus 1964).

Berkat perlakuan istimewa pemerintah pada Shell, disebabkan statusnya sebagai perusahaan minyak, ia tidak terkena gelombang dinasionalisasi perusahaan Inggris yang berakhir pada 30 November 1964, tepat 10 bulan setelah surat edaran Chaerul Saleh dikeluarkan. Shell Balikpapan baru dinasionalisasi pada 22 Juni 1965, ketika aset-asetnya diserahterimakan kepada PN Permina (Perusahaan Minyak Nasional) pimpinan Ibnu Sutowo (*Harian Rakjat*, 22 Juni 1965). Dengan demikian, berakhirilah dominasi Shell yang telah berlangsung sejak akhir abad ke-19 itu di Balikpapan dan kesenjangan sosial dalam bentuk segregasi yang ia terapkan.

Kesimpulan

Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda sama sekali tidak berarti kolonialisme dan imperialisme sepenuhnya sirna. Belanda tetap mempertahankan dominasinya terhadap Indonesia di bidang ekonomi melalui perusahaan-perusahaan raksasanya, seperti BPM. Masa pascakolonial tidak berarti hilangnya kesenjangan sosial dari masa sebelumnya, sebagaimana yang terjadi di Balikpapan. Bahkan, ketika BPM digantikan oleh PT Shell Indonesia dan pegawai-pegawai Belanda digantikan oleh pegawai-pegawai Inggris, diskriminasi dan segregasi terhadap buruh Indonesia tetap dilestarikan.

Keadaan yang sangat merugikan ini ditentang keras oleh kaum buruh dan partai-partai politik di Indonesia dari berbagai aliran, diawali dengan PKI yang telah menyerukan nasionalisasi aset-aset BPM di Balikpapan sejak September 1959. Konflik antara buruh BPM/Shell dengan perusahaan mereka memuncak dalam dua aksi ambil alih, pertama yang dikoordinasi

oleh Brigjen Soehario selaku ketua Front Nasional Kalimantan Timur dan Pangdam IX/Mulawarman pada 16 September 1963 dan yang kedua oleh serikat-serikat buruh di bawah naungan KABM pada 23 Januari 1964.

Dalam kedua aksi tadi, kaum buruh Indonesia berhasil menguasai sepenuhnya aset-aset Shell di Balikpapan dan menjalankan kegiatan usaha tanpa perintah atau bantuan tenaga kerja asing, terutama orang-orang Inggris. Meski begitu, keduanya berlangsung tidak lama, sebab pemerintah pusat enggan membiarkan Shell terganggu oleh aksi kaum buruh karena statusnya yang istimewa sebagai perusahaan minyak. Alhasil, nasionalisasi kilang minyak di Balikpapan baru terlaksana pada 22 Juni 1965. Artikel ini membuktikan bahwa kaum buruh tidak tinggal diam menghadapi kesenjangan yang mereka alami. Justru, mereka gigih melawan hal tersebut dan menjadikannya motivasi untuk merebut kendali kilang minyak di Balikpapan dari tangan atasan mereka yang berkebangsaan asing.

Daftar Pustaka

Arsip

“Surat DPT Perbum kepada NV De BPM di Balikpapan,” 21 September 1953, dalam Arsip Tekstual Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri RI 1950-1959 Jilid II, No. 1769, Koleksi Arsip Nasional RI Jakarta.

Buku

Algemeen Verslag van het Inlandsch Onderwijs in Nederlandsch-Indië, 1912, Batavia: Javasche Boekhandel & Drukkerij.

Bambang Sulistyono, Menuju Nasionalisasi Pertambangan Minyak di Balikpapan (1930-1965), 2013, dalam Erwiza Erman dan Ratna Saptari (ed.), *Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa*, . 142-175, Jakarta: KITLV-Jakarta.

Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*, 2001, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Burhan Djabir Magenda, East Kalimantan: The Decline of a Commercial Aristocracy, 1991, Ithaca: Cornell University Press.

Departemen Pertambangan dan Energi, *40 Tahun Peranan Pertambangan dan Energi Indonesia 1945-1985*, 1986, Jakarta: Departemen Pertambangan dan Energi.

Gerakan Perbum dan Aspek-Aspeknya dalam Industri Minyak di Indonesia, 1972, Jakarta: Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 2018, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, *Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur dari Masa ke Masa*, 1992, Samarinda: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Pidato Kawan Fachrul Baraqbah, 1960, dalam *Bintang Merah Nomor Special Jilid II, Dokumen-Dokumen Kongres Nasional Ke-VI Partai Komunis Indonesia, 7-14 September 1959*, . 500-504, Jakarta: Jajasan Pembaruan.

Soehario Padmodiwirio, *Memoar Hario Kecil: Autobiografi Seorang Mahasiswa Prajurit*, 1995, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Van Driest, F.L., *Memorie van overgave van de onderafdeling Balikpapan*, 1931, dalam Inventaris van de Memories van Overgave, 1852-1962, No. 1056, Koleksi Nationaal Archief Den Haag.

Skripsi dan Disertasi

Akhmad Ryan Pratama, *Industri Minyak di Balikpapan Dalam Lintasan Kekuasaan 1900-1966*, 2012, Skripsi Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Airlangga.

Redfern, William A., *Sukarno's Guided Democracy and the Takeovers of Foreign Companies in Indonesia in the 1960s*, 2010, Disertasi University of Michigan.

Artikel Surat Kabar dan Majalah

Amirdjaja, "Berita dari Kalimantan Timur: Di-mana2 ada pertempuran," *Harian Rakjat*, 8 Juni 1964, hlm. 2.

"Berita Daerah-Balikpapan," *Harian Rakjat*, 22 Juni 1965, hlm. 2.

"Bioskop BPM ditutup Karena angkuh," *Harian Rakjat*, 12 September 1960, hlm. 2.

"Borneo," *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, 6 April 1912, hlm. 1.

"B.P.M. bouwt op in Balikpapan," *Java Bode*, 18 September 1951, hlm. 2.

"B.P.M. gaat over in Shell-Indonesië," *Algemeen Handelsblad*, 28 Maret 1958, hlm. 17.

"BPM hendak 'di-Inggerisasikan'," *Sin Po*, 14 November 1958, hlm. 2.

"Dari Konferensi SOBSI Balikpapan: Rubah peraturan '26 Mei' ambil-

- alih PT Shell!,” *Harian Rakjat*, 14 Desember 1963, hlm. 2.
- “De ‘relletjes’ te Balikpapan,” *De Expres*, 13 April 1912, hlm. 2.
- Hamdi, “Sahkan Garapan Rakjat Diatas Tanah Konsesi,” *Suara Tani*, Th. XII, No. 7, Juli 1961, 5, hlm. 7.
- “Indonesianisatie bij de B.P.M.,” *Algemeen Indisch Dagblad de Preangerbode*, 31 Oktober 1957, hlm. 2.
- “Kaum buruh minyak Balikpapan laksanakan pemboikotan terhadap Inggris,” *Harian Rakjat*, 20 September 1963, hlm. 2.
- “Kaum buruh Balikpapan menuntut PT Shell diambil-alih,” *Harian Rakjat*, 16 Desember 1963, hlm. 2.
- “Keputusan sidang pleno PD FN Kaltim: Ambilalih PT Shell, kalau Inggris terus bantu Tengku,” *Harian Rakjat*, 29 Maret 1963, hlm. 2.
- “Kol. Suharjo Komisaris Pemerintah Untuk P.T. Shell Balikpapan,” *Harian Rakjat*, 23 September 1963, hlm. 1.
- “Konferensi PKI Kalimantan Timur: Perhebat pelaksanaan Tri Komando, sita modal Belanda!,” *Harian Rakjat*, 21 April 1962, hlm. 2.
- Martomo, “Balikpapan selajang pandang: Diskriminasi jang menjolok mata,” *Kedaulatan Rakyat*, 21 Juni 1956, hlm. 3.
- “Nwe Shell neemt Ind. belangen B.P.M. overm,” *Trouw*, 10 Maret 1960, hlm. 11.
- “Oil town women, children flown to -S’pore,” *The Straits Times*, 3 Oktober 1963, hlm. 1.
- “Pengumuman Pemerintah: Pemerintah mengerti reaksi Rakjat, dan diandjurkan tidak bertindak sendiri-sendiri,” *Warta Bhakti*, 20 Januari 1964, hlm. 1.
- “Perundingan KABM/N.V. BPM Deadlock?,” *Nasional*, 15 Februari 1951, hlm. 2.
- “PT Shell adakan peraturan untuk mengadu-domba buruh,” *Harian Rakjat*, 21 Agustus 1964, hlm. 2.
- “Pemerintah-KABM bitjarakan status BPM/Shell,” *Harian Rakjat*, 3 Maret 1964, hlm. 2.
- Sayid Fachrul Baraqbah, “Kalimantan Timur dan MPRS,” *Harian Rakjat*, 30 Desember 1960, hlm. 3.

“SB2 Minjak Tolak Tenaga Asing Pada PT Shell Balikpapan,” *Merdeka*, 29 Desember 1962, hlm. 2.

“Shell Balikpapan dan Surabaya: Hanja tunduk pada Pimpinan Perusahaan Pusat,” *Warta Bhakti*, 10 Februari 1964, hlm. 2.

“Shell Seluruh Indonesia Diambilalih,” *Harian Rakjat*, 21 Januari 1964, hlm. 1.

“Tindakan-tindakan balasan makin meluas: P.T. Shell diambil alih buruh,” *Warta Bhakti*, 20 Januari 1964, hlm. 1.